



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip dinamis bagi publik serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
4. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.

10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
12. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
13. Biasa adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
14. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
16. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
17. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip Aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas serta realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. menyediakan informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses publik seluas-luasnya; dan
 - d. menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, memuat informasi Biasa, Terbatas, dan Rahasia;

- b. Pengamanan Arsip Dinamis, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip Dinamis, bagi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan publik.

Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Sentralisasi dalam penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penetapan kebijakan untuk melakukan pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat.
- (4) Desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip yang diserahkan pada masing-masing unit pengelola.
- (5) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur atau prosedur tetap;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Pasal 5

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibedakan atas tingkat Klasifikasi informasi:
 - a. Biasa;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.

- (2) Tingkat Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk teknis pengamanan, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya maka semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan
 - b. untuk pengaturan akses, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya maka semakin ketat dalam pengaturan aksesnya.
- (3) Pegawai Kementerian koordinator Bidang Perekonomian hanya dapat mengakses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
- (4) Publik dapat mengakses Arsip Dinamis dengan tingkat Klasifikasi informasi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis tingkat Klasifikasi informasi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dicetak menggunakan kertas HVS sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Arsip Dinamis tingkat Klasifikasi informasi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dicetak menggunakan kertas *concuero* sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Arsip Dinamis tingkat Klasifikasi informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dicetak menggunakan kertas *concuero* dan diberi *watermark* sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

- (1) Untuk keamanan Arsip Dinamis dilakukan penyimpanan menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak, *filing cabinet*, serta lemari besi;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

Pasal 8

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan sarana penyimpanan Arsip.
- (2) Sarana penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori:
 - a. Arsip Biasa, disimpan pada rak besi;
 - b. Arsip Terbatas, disimpan pada *filing cabinet*; dan
 - c. Arsip Rahasia, disimpan pada lemari besi.

Pasal 9

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa penciptaan daftar Arsip.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.

Pasal 10

- (1) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditempatkan di *central file* pada Unit Pengolah dan *records center* pada Unit Kearsipan.
- (2) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip di *central file* pada Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam pengelolaan Arsip Aktif di setiap unit kerja.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip di *records center* pada Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam pengelolaan Arsip Inaktif.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi atas fungsi fasilitatif dan fungsi substantif, yang disusun dalam tabel daftar Arsip Dinamis.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Iktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
FUNGSI FASILITATIF						
PR.		PERENCANAAN				
PR.1		Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
1.	PR.1.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ Master Plan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
2.	PR.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

3.	PR.1.3	Rencana Strategis (Renstra)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
4.	PR.1.4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
PR.2		Perencanaan Kinerja dan Anggaran				
5.	PR.2.1	Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
6.	PR.2.2	Rencana Kinerja Tahunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
7.	PR.2.3	Inisiatif Baru	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
PR.3		Penetapan Kinerja				
8.	PR.3.1	Menteri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
9.	PR.3.2	Pimpinan Unit Kerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

PR.4		Revisi Dokumen Anggaran				
10.	PR.4.1	Revisi Dokumen Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
11.	PR.4.2	Anggaran Belanja Tambahan (ABT)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
12.	PR.4.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
AK.		AKUNTABILITAS KINERJA				
AK.1		Perencanaan Kinerja				
13.	AK.1.1	Penyusunan Indikator Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
14.	AK.1.2	Penetapan Perjanjian Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
15.	AK.1.3	Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
AK.2		Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja				
16.	AK.2.1	Pengumpulan Data Capaian Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

17.	AK.2.2	Pengukuran Capaian Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
18.	AK.2.3	Pengembangan Manajemen Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
AK.3		Pelaporan Kinerja				
19.	AK.3.1	Laporan Capaian Kinerja Berkala	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
20.	AK.3.2	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
21.	AK.3.3	Laporan Insidental/ Capaian Kinerja Lainnya	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
AK.4		Evaluasi Kinerja				
22.	AK.4.1	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
23.	AK.4.2	Laporan Hasil Evaluasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
24.	AK.4.3	Pemanfaatan Hasil Evaluasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

EP.		EVALUASI DAN PELAPORAN				
25.	EP.1	Pemantauan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
EP.2		Evaluasi Program				
26.	EP.2.1	Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
27.	EP.2.2	Evaluasi Program Kementerian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
EP.3		Laporan				
28.	EP.3.1	Laporan Berkala	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
29.	EP.3.2	Laporan Khusus/Laporan Insidental	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
30.	EP.3.3	Laporan Perkembangan (<i>Progress Report</i>)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
OT.		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
31.	OT.1	Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

32.	OT.2	Uraian Tugas	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
OT.3		Penataan Instrumen Jabatan				
33.	OT.3.1	Analisis Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
34.	OT.3.2	Analisis Beban Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
35.	OT.3.3	Standar Kompetensi Jabatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
36.	OT.3.4	Peta Jabatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
37.	OT.3.5	Evaluasi Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
OT.4		Penataan Tata Laksana				
38.	OT.4.1	Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

39.	OT.4.2	Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
40.	OT.4.3	Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
41.	OT.4.4	Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
42.	OT.5	Manajemen Reformasi Birokrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
DI.		DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI				
43.	DI.1	Pengelolaan Data	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
DI.2		Sistem Informasi				
44.	DI.2.1	Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
45.	DI.2.2	Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan

46.	DI.2.3	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
47.	DI.2.4	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
48.	DI.2.5	Dokumen Hosting	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
49.	DI.2.6	Layanan <i>Back Up</i> Data Digital	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
PS.		PERPUSTAKAAN				
PS.1		Pengadaan Bahan Pustaka				
50.	PS.1.1	Pembelian Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
51.	PS.1.2	Hibah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
52.	PS.1.3	Sumbangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
53.	PS.1.4	Kerjasama	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

PS.2		Pengolahan Bahan Pustaka				
54.	PS.2.1	Inventarisasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
55.	PS.2.2	Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
56.	PS.2.3	<i>Stock Opname</i>	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
57.	PS.2.4	Penyiangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
PS.3		Layanan Perpustakaan				
58.	PS.3.1	Sirkulasi Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
59.	PS.3.2	Keanggotaan Perpustakaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
PH.		PRODUK HUKUM				
60.	PH.1	Program Legislasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

PH.2		Produk Hukum				
61.	PH.2.1	Penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan: a. Non Sistemik;	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
		b. Sistemik.	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
62.	PH.2.2	Penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan: a. Non Sistemik;	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
		b. Sistemik.	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
63.	PH.2.3	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
64.	PH.2.4	Instruksi/Surat Edaran Eselon I atau Eselon II	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
65.	PH.2.5	Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

PH.3		Perjanjian Kerjasama				
66.	PH.3.1	Perjanjian Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
67.	PH.3.2	Perjanjian Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
68.	PH.4	Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
69.	PH.5	Telaah Produk Hukum/ Perjanjian/Akta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
70.	PH.6	Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
PH.7		Advokasi Hukum				
71.	PH.7.1	Advokasi Hukum Kasus Perdata	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

72.	PH.7.2	Advokasi Hukum Kasus Pidana	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
73.	PH.7.3	Advokasi Hukum Kasus Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
SD.		PERSIDANGAN				
SD.1		Rapat Koordinasi Tingkat Menteri				
74.	SD.1.1	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) a. Bahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
		b. Risalah 1) Non Sistemik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
		2) Sistemik	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
75.	SD.2	Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya a. Bahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

		b. Risalah 1) Non Sistemik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
		2) Sistemik	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
SD.3		Rapat Internal Staf				
76.	SD.3.1	Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
77.	SD.3.2	Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
HM.		KEHUMASAN				
78.	HM.1	Peliputan dan Dokumentasi a. Peliputan dan dokumentasi rapat koordinasi/rapat terbatas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1) Non Sistemik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

		2) Sistemik	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
		b. Peliputan dan dokumentasi kunjungan kerja menteri, pembukaan acara dan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
79.	HM.2	Penyajian Informasi				
80.	HM.2.1	Publikasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
81.	HM.2.2	Penerbitan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
82.	HM.2.3	Pers/Media Massa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
83.	HM.3	Keterbukaan Informasi Publik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

HM.4		Hubungan Antar Lembaga				
84.	HM.4.1	Lembaga Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
85.	HM.4.2	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
86.	HM.4.3	Perusahaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
87.	HM.4.4	Perguruan Tinggi/Sekolah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
88.	HM.4.5	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
89.	HM.4.6	Siaran Pers/Konferensi Pers/ <i>Pers Release</i>	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

HM.5		Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan				
90.	HM.5.1	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
91.	HM.5.2	Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
92.	HM.6	Dokumen Hosting	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
93.	HM.7	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
TU.		KETATAUSAHAAN				
94.	TU.1	Persuratan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
95.	TU.1.1	Pengurusan Surat Masuk a. Non Sistemik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

		b. Sistemik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
		c. Amplop tertutup/kawat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	
96.	TU.2	Penggandaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
97.	TU.3	Permintaan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
TU.4		Kearsipan				
98.	TU.4.1	Penyusunan Sistem	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
99.	TU.4.2	Pemindahan Arsip	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
100.	TU.4.3	Pemusnahan Arsip	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
101.	TU.4.4	Penyerahan Arsip	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

102.	TU.4.5	Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
103.	TU.5	Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
TU.6		Keprotokolan				
104.	TU.6.1	Upacara/Acara Kedinasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
105.	TU.6.2	Agenda Pimpinan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
106.	TU.6.3	Kunjungan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
107.	TU.6.4	a. Non Sistemik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
		b. Sistemik	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	

TU.7		Tata Usaha				
108.	TU.7.1	Tata Usaha Menteri Koordinator Perekonomian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
109.	TU.7.2	Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
110.	TU.7.3	Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.		KEPEGAWAIAN				
KP.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
111.	KP.1.1	Perencanaan Kebutuhan ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
112.	KP.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
113.	KP.1.3	Penetapan kebutuhan ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

114.	KP.1.4	Standardisasi Jabatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
115.	KP.2	Formasi Pegawai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.3		Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil				
116.	KP.3.1	Proses Rekrutmen ASN	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
117.	KP.3.2	Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
118.	KP.3.3	Berkas Lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
119.	KP.3.4	Nota Usul Pengangkatan ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
120.	KP.4	Seleksi Terbuka Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

KP.5		Mutasi Pegawai				
121.	KP.5.1	Alih Tugas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
122.	KP.5.2	Kenaikan Pangkat/ Golongan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
123.	KP.5.3	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
124.	KP.5.4	Usulan Peninjauan Masa Kerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
125.	KP.5.5	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
126.	KP.5.6	Promosi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
127.	KP.5.7	Rotasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

128.	KP.5.8	Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.6		Pengangkatan dan Pemberhentian				
129.	KP.6.1	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
130.	KP.6.2	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
131.	KP.6.3	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.7		Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh)				
132.	KP.7.1	Pelaksana Tugas (Plt)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
133.	KP.7.2	Pelaksana Harian (Plh)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

KP.8		Pengembangan Karier Pegawai				
134.	KP.8.1	Kompetensi Pegawai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
135.	KP.8.2	Pemetaan/ <i>talent mapping</i> pegawai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
136.	KP.8.3	Ujian Penyesuaian Ijazah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
137.	KP.8.4	Ujian Dinas	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
138.	KP.8.5	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
139.	KP.8.6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/ Kursus	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
140.	KP.8.7	Tugas Belajar	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
141.	KP.8.8	Izin Belajar	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

142.	KP.8.9	Angka Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.9		Kinerja				
143.	KP.9.1	Hasil Penilaian Kinerja dan standar kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
144.	KP.9.2	Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
145.	KP.9.3	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
146.	KP.9.4	Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai ASN dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.10		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
147.	KP.10.1	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

148.	KP.10.2	Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
149.	KP.10.3	Pemberhentian Pegawai dengan Hormat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
150.	KP.10.4	Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
151.	KP.10.5	Pemberhentian Pegawai Sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
152.	KP.10.6	Pensiun ASN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
153.	KP.11	Bantuan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

KP.12		Status dan Kedudukan Pegawai				
154.	KP.12.1	Status dan kedudukan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
155.	KP.12.2	Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
156.	KP.12.3	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KP.13		Sistem Informasi Kepegawaian				
157.	KP.13.1	Pengolahan data dan informasi kepegawaian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
158.	KP.13.2	Pengembangan Sistem pengelolaan Arsip kepegawaian fisik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
159.	KP.13.3	Pengembangan Sistem pengelolaan Arsip kepegawaian elektronik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

KP.14		Administrasi Pegawai				
160.	KP.14.1	Data/Keterangan Pegawai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
161.	KP.14.2	Cuti	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
162.	KP.14.3	Kartu Pegawai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
163.	KP.14.4	Kartu Istri/Kartu Suami	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
164.	KP.14.5	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
165.	KP.14.6	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
166.	KP.14.7	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

KP.16		Organisasi Non Kedinasan				
167.	KP.16.1	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
168.	KP.16.2	Dharma Wanita	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
169.	KP.16.3	Koperasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
170.	KP.17	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
171.	KP.18	Pengarusutamaan Gender	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
BM		BARANG MILIK NEGARA				
172.	BM.1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
BM.2		Pengadaan Barang dan Jasa				
173.	BM.2.1	Pengadaan Barang habis pakai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

174.	BM.2.2	Pengadaan Barang Bergerak/Barang inventaris	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
175.	BM.2.3	Pengadaan Tanah dan Bangunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
176.	BM.2.4	Pengadaan Jasa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
177.	BM.2.5	Pengadaan <i>Software</i>	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
BM.3		Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				
178.	BM.3.1	Pejabat Pengguna BM	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
179.	BM.3.2	Pembukuan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
180.	BM.3.3	Inventarisasi Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
181.	BM.3.4	Pergudangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

182.	BM.3.5	Penggunaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
183.	BM.3.6	Pemanfaatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
184.	BM.3.7	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
185.	BM.3.8	Penilaian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
186.	BM.3.9	Pemindahtanganan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
187.	BM.3.10	Pemusnahan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
188.	BM.3.11	Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
189.	BM.3.12	Laporan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
190.	BM.4	Pengawasan dan Pengendalian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

BM.5		Penatausahaan Barang Persediaan				
191.	BM.5.1	Pengadaan Barang Persediaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
192.	BM.5.2	Distribusi Barang Persediaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
193.	BM.5.3	Laporan Barang Persediaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
194.	BM.5.4	Standar Harga Barang Persediaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
195.	BM.6	Pengawasan dan Pengendalian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
RT.		RUMAH TANGGA				
RT.1		Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				
196.	RT.1.1	Gedung dan Bangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
197.	RT.1.2	Kendaraan Dinas	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

198.	RT.1.3	Instalasi/jaringan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
199.	RT.2	Keamanan dan Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
200.	RT.3	Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
201.	RT.4	Pertamanan dan Kebersihan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KU		ADMINISTRASI KEUANGAN				
KU.1		Pelaksanaan Anggaran				
202.	KU.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
203.	KU.1.2	Pengeluaran Anggaran/ Belanja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
204.	KU.1.3	Penggajian dan Tunjangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

205.	KU.1.4	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KU.2		Pengelolaan Perbendaharaan				
206.	KU.2.1	Pajak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
207.	KU.2.2	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
208.	KU.2.3	Rekening Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
209.	KU.2.4	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
210.	KU.2.5	Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

211.	KU.3	Ketatausahaan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
KU.4		Laporan Keuangan				
212.	KU.4.1	Laporan Keuangan Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
213.	KU.4.2	Laporan Keuangan Triwulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
214.	KU.4.3	Laporan Keuangan Semesteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
215.	KU.4.4	Laporan Keuangan Tahunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
216.	KU.4.5	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
217.	KU.5	Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

218.	KU.5.1	Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
219.	KU.5.2	Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum
PW.		PENGAWASAN				
PW.1		Perencanaan Kebijakan Pengawasan				
220.	PW.1.1	Perencanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
221.	PW.1.2	Kerjasama Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
PW.2		Audit/Pemeriksaan				
222.	PW.2.1	Audit Kinerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
223.	PW.2.2	Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat

224.	PW.2.3	<i>Probity Audit</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
PW.3		Reviu				
225.	PW.3.1	Reviu Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
226.	PW.3.2	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
227.	PW.3.3	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
228.	PW.3.4	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BM)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat

229.	PW.3.5	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
PW.4		Evaluasi				
230.	PW.4.1	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
231.	PW.4.2	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
232.	PW.4.3	Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
233.	PW.4.4	Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
234.	PW.4.5	Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat

PW.5		Pemantauan				
235.	PW.5.1	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Inspektorat
236.	PW.5.2	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Inspektorat
237.	PW.5.3	Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Inspektorat
238.	PW.5.4	Pemantauan Disiplin Pegawai	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Inspektorat
PW.6		Pengawasan Lainnya				
239.	PW.6.1	Pedoman Pengawasan Internal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
240.	PW.6.2	Pembinaan Komitmen Anti Korupsi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat

241.	PW.6.3	<i>Whistleblowing System</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
242.	PW.6.4	Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
243.	PW.6.5	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
244.	PW.6.6	Pengelolaan Gratifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
245.	PW.6.7	Forum Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Inspektorat
FUNGSI SUBSTANTIF						
EK.		EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN				
EK.1		Fiskal				
246.	EK.1.1	Penerimaan Pajak	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Fiskal
247.	EK.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Fiskal

248.	EK.1.3	Pengeluaran Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Fiskal
249.	EK.1.4	Pembiayaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Fiskal
EK.2		Moneter dan Neraca Pembayaran				
250.	EK.2.1	Stabilitas Moneter	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
251.	EK.2.2	Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
252.	EK.2.3	Neraca Pembayaran	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
253.	EK.2.4	Posisi Investasi Internasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

EK.3		Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil				
254.	EK.3.1	Ekonomi Kawasan Barat Indonesia	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
255.	EK.3.2	Ekonomi Kawasan Timur Indonesia	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
256.	EK.3.3	Sektor Riil Barang	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
257.	EK.3.4	Sektor Riil Jasa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
EK.4		Pasar Modal dan Lembaga Keuangan				
258.	EK.4.1	Pasar Modal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

259.	EK.4.2	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
260.	EK.4.3	Perbankan Umum	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
261.	EK.4.4	Perbankan Syariah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
EK.5		Badan Usaha Milik Negara				
262.	EK.5.1	Usaha Agro dan Industri Strategis	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
263.	EK.5.2	Usaha Energi Logistik dan Perhubungan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
264.	EK.5.3	Usaha Jasa Keuangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
265.	Ek.5.4	Usaha Jasa Non Keuangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara

TAN		PANGAN DAN PERTANIAN				
TAN.1		Pangan				
266.	TAN.1.1	Produksi dan Distribusi Pangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pangan
267.	TAN.1.2	Konsumsi dan Cadangan Pangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pangan
TAN.2		Peternakan dan Perikanan				
268.	TAN.2.1	Peternakan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peternakan dan Pertanian
269.	TAN.2.2	Perikanan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peternakan dan Pertanian
TAN.3		Perkebunan dan Hortikultura				
270.	TAN.3.1	Perkebunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura
271.	TAN.3.2	Hortikultura	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura

TAN.4		Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian				
272.	TAN.4.1	Prasarana Pangan dan Pertanian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
273.	TAN.4.2	Sarana Pangan dan Pertanian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
TAN.5		Agribisnis				
274.	TAN.5.1	Pembiayaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Agribisnis
275.	TAN.5.2	Kelembagaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Agribisnis
ENG		PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				
ENG.1		Produktivitas Energi				
276.	ENG.1.1	Produktivitas Hulu Energi Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Produktivitas Energi
277.	ENG.1.2	Produktivitas Hilir Energi Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Produktivitas Energi

278.	ENG.1.3	Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Produktivitas Energi
279.	ENG.1.4	Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Produktivitas Energi
ENG.2		Infrastruktur Energi				
280.	ENG.2.1	Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Energi
281.	ENG.2.2	Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Energi
282.	ENG.2.3	Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Non Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Energi
283.	ENG.2.4	Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Energi
ENG.3		Industri Ekstraktif				
284.	ENG.3.1	Industri Ekstraktif Energi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Industri Ekstraktif
285.	ENG.3.2	Industri Ekstraktif Mineral	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Industri Ekstraktif

ENG.4		Tata Kelola Kehutanan				
286.	ENG.4.1	Hasil Hutan Kayu	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
287.	ENG.4.2	Hasil Hutan Non Kayu	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
288.	ENG.4.3	Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
289.	ENG.4.4	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
ENG.5		Pelestarian Lingkungan Hidup				
290.	ENG.5.1	Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
291.	ENG.5.2	Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
292.	ENG.5.3	Mitigasi Perubahan Iklim	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup

293.	ENG.5.4	Adaptasi Perubahan Iklim	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
KWU.		EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
KWU.1		Pengembangan Ekonomi Kreatif				
294.	KWU.1.1	Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
295.	KWU.1.2	Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
296.	KWU.1.3	Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
297.	KWU.1.4	Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

KWU.2		Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan				
298.	KWU.2.1	Promosi Potensi Bahan Baku Lokal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
299.	KWU.2.2	Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
300.	KWU.2.3	Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
301.	KWU.2.4	Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
KWU.3		Pengembangan Kewirausahaan				
302.	KWU.3.1	Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

303.	KWU.3.2	Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
304.	KWU.3.3	Penempatan dan Pembibitan Wirausaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
305.	KWU.3.4	Inkubator Wirausaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
KWU.4		Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah				
306.	KWU.4.1	Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
307.	KWU.4.2	Pengembangan Usaha Koperasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

308.	KWU.4.3	Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
309.	KWU.4.5	Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
KWU.5		Ketenagakerjaan				
310.	KWU.5.1	Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Ketenagakerjaan
311.	KWU.5.2	Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Ketenagakerjaan
312.	KWU.5.3	Pengembangan Lembaga Mediasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Ketenagakerjaan
313.	KWU.5.4	Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Ketenagakerjaan

PI.		PERNIAGAAN DAN INDUSTRI				
PI.1		Pengembangan Investasi				
314.	PI.1.1	Kemudahan dan Insentif Investasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Investasi
315.	PI.1.2	Perluasan dan Promosi Investasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Investasi
PI.2		Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional				
316.	PI.2.1	Peningkatan Ekspor	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
317.	PI.2.2	Fasilitasi Perdagangan Internasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
318.	PI.2.3	Pengendalian Impor	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

PI.3		Pengembangan Logistik Nasional				
319.	PI.3.1	Kelembagaan Logistik Nasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
320.	PI.3.2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
321.	PI.3.3	Pengembangan Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
PI.4		Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha				
322.	PI.4.1	Pembinaan dan Penataan Pasar	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
323.	PI.4.2	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

324.	PI.4.3	Persaingan Usaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
325.	PI.4.4	Perlindungan Konsumen	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
PI.5		Pengembangan Industri				
326.	PI.5.1	Pengembangan Industri Padat Karya	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Industri
327.	PI.5.2	Pengembangan Teknologi Industri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Industri
IPW.		INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH				
IPW.1		Infrastruktur Sumber Daya Air				
328.	IPW.1.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
	IPW.1.2	Pendayagunaan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air

IPW.2		Telematika dan Utilitas				
329.	IPW.2.1	Telematika	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
330.	IPW.2.2	Utilitas	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
IPW.3		Sistem Transportasi Multimoda				
331.	IPW.3.1	Sistem Transportasi Jalan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda
332.	IPW.3.2	Sistem Transportasi Non Jalan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda
IPW.4		Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi				
333.	IPW.4.1	Penataan Ruang	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
334.	IPW.4.2	Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

335.	IPW.4.3	Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
IPW.5		Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur				
336.	IPW.5.1	Perumahan dan Pertanahan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
337.	IPW.5.2	Pembiayaan Infrastruktur	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
KSI.		KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL				
KSI.1		Kerja Sama Ekonomi Asia				
338.	KSI.1.1	Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
339.	KSI.1.2	Kerja Sama Ekonomi Asia Timur	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
340.	KSI.1.3	Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

341.	KSI.1.4	Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
KSI.2		Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah				
342.	KSI.2.1	Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
343.	KSI.2.2	Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
344.	KSI.2.3	Kerja Sama Ekonomi Afrika	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
345.	KSI.2.4	Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

KSI.3		Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik				
346.	KSI.3.1	Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
347.	KSI.3.2	Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
348.	KSI.3.3	Kerja Sama Ekonomi Australia	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
349.	KSI.3.4	Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
KSI.4		Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional				
350.	KSI.4.1	Kerja Sama Ekonomi APEC	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

351.	KSI.4.2	Kerja Sama Ekonomi Sub Regional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
352.	KSI.4.3	Kerja Sama Ekonomi ASEAN	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
353.	KSI.4.4	Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
KSI.5		Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan				
354.	KSI.5.1	Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
355.	KSI.5.2	Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

356.	KSI.5.3	Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
357.	KSI.5.4	Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
358.	KPE	Kebijakan Pemerataan Ekonomi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
359.	SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
360.	PKLN	Pinjaman Komersial Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
361.	KUR	Kredit Usaha Rakyat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

362.	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
363.	CPOPC	<i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Agrbisnis
364.	eCom	Ekonomi Digital	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
365.	VKS	Vokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
366.	PKE	Paket Kebijakan Ekonomi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan
367.	EODB	Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Investasi

368.	OMP	Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
369.	KPIIP	Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
370.	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
371.	KEIN	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional
372.	EITI	Inisiasi Transparansi Industri Ekstraktif/ <i>Extractive Industries Transparency Initiatives</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Industri Ekstraktif
373.	EKUM	Ekonomi Umat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

374.	RA	Reforma Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
375.	PK	Penugasan Khusus Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002